



Integrasi Pas Kecil dan Komunikasi Risiko dalam Membangun Budaya Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Telaga Biru

Moehammad Roemyansyah*, Ari Srientini, Supangat

Universitas Hang Tuah, Indonesia

Email: moehammadroemyansyah1992@gmail.com*,
ari.srientini@hangtuah.ac.id, supangat.supangat@hangtuah.ac

Keywords	Abstract
<i>small port permit; risk communication; safety culture; traditional fishermen; vessels under 7 gt.</i>	<i>Maritime safety in the traditional capture fisheries sector with vessels under 7 Gross Tonnage (GT) often faces challenges due to low administrative compliance and safety awareness. This study aims to analyze the level of traditional fishers' awareness of navigation safety based on Small Pass, identify the risk communication mechanisms applied, and formulate a pattern of integration of both in the Telaga Biru Port area. Using a descriptive method with a qualitative approach, data were collected through field observations, in-depth interviews with traditional fishers, and recapitulation of data from the Class III Telaga Biru Port Organizing Unit (KUPP) Office. The results of the study show a large administrative gap, where 60% of fishers do not yet have a Small Pass. Fishermen generally experience a cognitive gap by considering the Small Port Permit merely a formality to dock in order to avoid officer sanctions. Port authorities integrate risk communication by using the ship's physical measurement moment as an entry point for two-way participatory dialogue. The socio-cultural approach, using local language, utilizing visual and digital media (BMKG Info), and involving local champions (community leaders), has proven effective in transforming fishermen's knowledge, attitudes, and behaviors in building a strong maritime safety culture.</i>
Kata Kunci	Abstrak
<i>pas kecil; komunikasi risiko; budaya keselamatan; nelayan tradisional; kapal di bawah 7 gt.</i>	<i>Keselamatan pelayaran pada sektor perikanan tangkap tradisional dengan kapal di bawah 7 Gross Tonnage (GT) sering kali menghadapi tantangan akibat rendahnya kepatuhan administratif dan kesadaran keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran nelayan tradisional terhadap keselamatan pelayaran berbasis Pas Kecil, mengidentifikasi mekanisme komunikasi risiko yang diterapkan, serta merumuskan pola</i>

integrasi keduanya di wilayah Pelabuhan Telaga Biru. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data dihimpun melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan nelayan tradisional, serta rekapitulasi data dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Telaga Biru. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan (gap) administratif yang besar, di mana 60% nelayan belum memiliki Pas Kecil. Nelayan umumnya mengalami kesenjangan kognitif (cognitive gap) dengan menganggap Pas Kecil sebatas formalitas izin bersandar demi menghindari sanksi petugas. Otoritas pelabuhan mengintegrasikan komunikasi risiko dengan menjadikan momentum pengukuran fisik kapal sebagai entry point dialog partisipatif dua arah. Pendekatan sosiokultural menggunakan bahasa lokal, pemanfaatan media visual dan digital (Info BMKG), serta pelibatan local champions (tokoh masyarakat) terbukti efektif mentransformasi aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku nelayan dalam membangun budaya keselamatan (safety culture) maritim yang kokoh.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan dengan cakupan perairan maritim yang sangat luas, Indonesia menempatkan sektor perikanan tangkap sebagai pilar ekonomi krusial bagi masyarakat pesisir. Di wilayah Pelabuhan Telaga Biru, mayoritas aktivitas operasional melaut digerakkan oleh nelayan tradisional yang menggunakan armada kapal berukuran kecil di bawah 7 *Gross Tonnage* (GT) (Agatha, 2024; Antão & Soares, 2020; Fauziningrum & dkk., 2025; Patiranti, 2020). Keterbatasan adopsi teknologi navigasi serta minimnya standardisasi peralatan penunjang membuat kelompok nelayan ini memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap risiko kecelakaan kerja di laut (Pesireron et al., 2025; Rahman & Munadi, 2019; Rizwanda & Sari, 2024). Berbagai kasus kecelakaan laut yang menimpa armada kapal kecil berakar dari faktor manusia (*human factors*), khususnya rendahnya kepatuhan operasional, minimnya pemahaman prosedur kedaruratan, serta belum terbangunnya budaya keselamatan (*safety culture*) yang kuat di lingkungan kerja mereka (Samsul & Rizky, 2021; Saputra et al., 2025; Silviani, 2025; Ugurlu et al., 2020).

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menetapkan instrumen regulasi berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mewajibkan kapal di bawah 7 GT mengantongi Pas Kecil sebagai bukti legalitas kebangsaan kapal dan kelaiklautan bendera Indonesia.

Aturan ini dipertegas secara teknis dalam PM No. 39 Tahun 2021 dan PM No. 45 Tahun 2021 (Domeh et al., 2021; Obeng et al., 2022b, 2022a; Sunardi et al., 2024). Di dalam lembar Pas Kecil sesungguhnya tercantum verifikasi kelaiklautan fisik dan prasyarat ketersediaan alat keselamatan minimum, seperti *life jacket*, *life buoy*, dan APAR portabel

Selain itu Pemerintah juga sebenarnya telah menetapkan instrumen regulasi berupa Pas Kecil (dan kini bertransformasi secara digital menjadi e-Pas Kecil) sebagai bukti legalitas kebangsaan, identitas hukum, sekaligus instrumen pengawasan kelaiklautan bagi kapal berukuran di bawah 7 GT. Landasan hukum pemenuhan dokumen ini secara tegas tertuang dalam Pasal 126 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta dipertegas secara teknis dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2021 dan PM 45 Tahun 2021. Secara esensial, lembar Pas Kecil memuat catatan spesifikasi teknis dan dimensi kapal serta verifikasi kelengkapan alat keselamatan dasar seperti *life jacket*, pelampung cincin (*life buoy*), alat komunikasi sederhana, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (Coraddu et al., 2020; Dallo & Marti, 2021; Sánchez-Beaskoetxea et al., 2021).

Namun demikian, observasi awal di Pelabuhan Telaga Biru menyingkap sebuah fenomena lapangan di mana banyak nelayan tidak mengenakan *life jacket* saat melaut, abai melengkapi sarana keselamatan darurat, dan memandang pengurusan Pas Kecil semata-mata sebagai "surat izin pajangan" untuk menghindari sanksi aparat pelabuhan. Berangkat dari problem tersebut, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada kebaruan (*novelty*) berupa strategi integrasi antara fungsi administratif administrasi kepelabuhanan (Pas Kecil) dengan pendekatan komunikasi risiko keselamatan pelayaran (*risk communication*) guna menggeser paradigma nelayan dari sekadar patuh karena paksaan regulasi menjadi patuh atas kesadaran proteksi diri.

Kendala utama di lapangan adalah adanya resistensi sosiokultural. Nelayan kerap kali menganggap pengurusan dokumen administrasi kepelabuhanan sebagai beban birokrasi yang rumit. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada strategi integrasi aspek legalitas formal (penerbitan e-Pas Kecil) dengan pendekatan komunikasi risiko (*risk communication*) yang bersifat humanis-edukatif untuk membangun budaya keselamatan pelayaran yang berkelanjutan di Pelabuhan Telaga Biru.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi antara administrasi kepelabuhanan (Pas Kecil) dan pendekatan komunikasi risiko keselamatan pelayaran pada kapal di bawah 7 *Gross Tonnage* (GT). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek teknis kapal atau analisis risiko kerja, serta memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian keselamatan pelayaran kapal di bawah 7 *Gross Tonnage* (GT), serta kontribusi praktis bagi otoritas pelabuhan dalam merancang strategi komunikasi keselamatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi antara administrasi kepelabuhanan (Pas Kecil) dan pendekatan komunikasi risiko keselamatan pelayaran pada kapal di bawah 7 GT, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah kebaruan strategi melalui integrasi fungsi kontrol legalitas-teknis Pas Kecil dengan pendekatan komunikasi risiko keselamatan pelayaran yang humanis-edukatif. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga rumusan masalah: (1) Bagaimana tingkat kesadaran nelayan berbasis Pas Kecil; (2) Bagaimana bentuk dan mekanisme komunikasi risiko yang diterapkan; dan (3) Bagaimana efektivitas integrasi keduanya dalam membangun budaya keselamatan di kalangan nelayan Pelabuhan Telaga Biru.

Penelitian ini menempatkan kesadaran nelayan sebagai fokus utama dengan Pas Kecil sebagai basis intervensi keselamatan. Penelitian berfokus dan diarahkan pada penguatan kesadaran keselamatan nelayan melalui pas kecil berbasis komunikasi resiko, mengingat pentingnya pas kecil dalam pelayaran nelayan maka penulis mengambil judul “*Integrasi Pas Kecil Dan Komunikasi Resiko Dalam Membangun Budaya Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Telaga Biru*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dipusatkan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Telaga Biru, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, serta mencakup wilayah kerja operasional nelayan tradisional setempat. Data primer diperoleh melalui teknik observasi langsung terhadap perilaku melaut para nelayan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama perwakilan nelayan serta

petugas pelabuhan. Data sekunder dihimpun dari dokumen rekapitulasi kepemilikan dokumen kapal resmi milik instansi KUPP.

Subjek penelitian terdiri dari petugas otoritas pelabuhan (Ahli Ukur Kapal dan Kesyahbandaran) serta para nelayan tradisional pemilik kapal di bawah 7 GT. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan langsung di pangkalan pendaratan ikan, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menguji variabel triadik dari kesadaran keselamatan, yaitu komponen Pengetahuan (*Knowledge*), Sikap (*Attitude*), dan Perilaku (*Behavior*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan objektif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan rekapitulasi data administratif di Pelabuhan Telaga Biru. Interpretasi dan pembahasan lebih lanjut atas temuan ini disajikan pada bagian Pembahasan.

Tingkat Kesadaran Nelayan terhadap Keselamatan Pelayaran Berbasis Pas Kecil

a. Potret Awal Kesadaran Keselamatan

Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa kesadaran keselamatan nelayan tradisional di Pelabuhan Telaga Biru masih bersifat pasif dan berada pada level pemenuhan administratif (*compliance-driven*). Motif nelayan mengurus e-Pas Kecil adalah agar kapal memiliki identitas formal, aman saat bersandar, dan terhindar dari sanksi atau teguran pihak Syahbandar.

Pengetahuan mengenai kelaiklautan fisik kapal dan kewajiban membawa alat pelampung (*life jacket*) yang tercantum dalam dokumen Pas Kecil masih sangat minim dihiraukan. Alat keselamatan tersebut kerap hanya disimpan di dalam palka kapal sebagai formalitas pemeriksaan petugas, bukan dipakai secara aktif untuk melindungi diri saat berlayar menangkap ikan.

b. Kesenjangan Kepemilikan Pas Kecil

Rekapitulasi data kepemilikan Pas Kecil dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) kuantitatif yang cukup signifikan antara jumlah total armada kapal nelayan lokal di bawah 7 GT yang aktif beroperasi dengan jumlah kapal yang telah mengantongi sertifikasi Pas Kecil resmi. Tren kepatuhan administrasi ini

cenderung melambat, dipengaruhi oleh resistensi sosial-ekonomi dan persepsi bahwa pengurusan dokumen merupakan hal yang rumit serta memakan biaya.

c. Evaluasi Model KAP (Knowledge, Attitude, Behavior)

Analisis terhadap tingkat kesadaran nelayan tradisional dipecah ke dalam tiga komponen psikologis utama:

- **Komponen Pengetahuan (Knowledge):** berada pada level "cukup tahu" secara formalitas luar, namun "parsial" secara substantif. Terjadi kesenjangan kognitif (cognitive gap*) di mana nelayan memandang Pas Kecil murni sebagai surat izin administratif agar tidak ditilang atau mendapat sanksi petugas pelabuhan, dan minim pengetahuan bahwa Pas Kecil sesungguhnya adalah instrumen validasi kelayakan fisik lambung kapal serta kontrol ketersediaan alat penunjang keselamatan nyawa.

- **Komponen Sikap (Attitude):** mayoritas nelayan menunjukkan sikap pasif yang dibayangi bias optimisme berlebihan (overconfidence*). Muncul persepsi bahwa "laut adalah halaman rumah kami" karena aktivitas melaut telah berjalan puluhan tahun secara turun-temurun, yang memicu pandangan bahwa prosedur keselamatan formal dari pemerintah merupakan hal yang merepotkan dan tidak mendesak.

- **Komponen Perilaku (Behavior):** manifestasi di lapangan menunjukkan ketidakselarasan antara regulasi dan praktik nyata. Banyak nelayan yang kapalnya telah memiliki sertifikat Pas Kecil, tetapi alat keselamatan seperti life jacket* hanya disimpan di dalam palka kapal sebagai formalitas untuk ditunjukkan saat pemeriksaan petugas, bukan dipakai demi melindungi nyawa saat berlayar.

Integrasi Pas Kecil dengan Komunikasi Risiko Keselamatan

a. Model Komunikasi Risiko Partisipatif-Dialogis

Guna meruntuhkan resistensi kultural nelayan, KUPP Kelas III Telaga Biru melakukan rekayasa sosial dengan mengintegrasikan instrumen administratif (Pas Kecil) dan pendekatan komunikasi risiko keselamatan pelayaran melalui empat pilar strategi:

- **Pengukuran kapal sebagai entry point komunikasi** — proses verifikasi dan pengukuran fisik kapal oleh Pejabat Ahli Ukur diubah fungsinya, tidak lagi berjalan kaku atau transaksional administratif, melainkan dimanfaatkan sebagai ruang dialog komunikasi risiko dua arah (interaktif-partisipatif*). Ketika mengukur lambung, petugas mengomunikasikan alasan logis hubungan dimensi kapal dengan batas stabilitas ketika dihantam ombak besar.

- Mengubah pola top-down menjadi dialog berbasis empati* — pola komunikasi searah berupa instruksi atau ancaman sanksi hukum diganti dengan narasi humanis yang menekankan tanggung jawab moral nelayan terhadap keselamatan diri demi anak dan istri yang menanti kepulangan mereka di rumah.

- Pendekatan sosiokultural kedaerahan (etnografi komunikasi) — sosialisasi dilepaskan dari kesan birokrasi formal; petugas mendatangi ruang-ruang pertemuan informal nelayan, seperti saat memperbaiki jaring di dermaga atau di pangkalan pendaratan ikan, dengan materi komunikasi berbahasa lokal (Madura) yang persuasif, tidak menggurui, dan menghormati kearifan lokal (local wisdom).

- Optimalisasi agen perubahan (local champions) — mengingat kuatnya ikatan sosial komunitas nelayan, komunikasi risiko mengandalkan keterlibatan tokoh masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, serta ketua kelompok nelayan lokal sebagai agent of change* yang menyebarkan pesan keselamatan pelayaran.

b. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Saluran Komunikasi Risiko

Bentuk komunikasi risiko yang diterapkan mencakup kombinasi multi-saluran, yaitu:

- Digital dan massa: pemanfaatan aplikasi Android seperti Info BMKG dan Laut Nusantara untuk memantau cuaca dan tinggi gelombang secara real-time, didukung sistem broadcast WhatsApp Group bersama ketua rukun nelayan untuk penyebaran informasi peringatan dini gelombang tinggi/siklon secara cepat.

- Visual di pangkalan: pemasangan papan pengumuman cuaca (weather board) harian di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta spanduk dan infografis panduan praktis penggunaan life jacket atau nomor darurat SAR di sepanjang area dermaga pelabuhan.

Integrasi ini didukung transisi aplikasi e-Pas Kecil, yang terbukti mempermudah birokrasi, menghemat biaya transportasi nelayan, serta menghemat waktu karena berkas permohonan dapat diajukan secara daring tanpa mengharuskan nelayan menempuh jarak jauh menuju kantor pusat KUPP. Untuk mengoptimalkan akses, pihak kantor juga membuka gerai pelayanan langsung di kantong-kantong pemukiman nelayan.

c. Dampak Integrasi terhadap Budaya Keselamatan Pelayaran

Melalui integrasi model komunikasi risiko dialogis pada momentum penerbitan dokumen e-Pas Kecil, pola pikir nelayan tradisional mengalami transformasi positif. Nelayan mulai menyadari bahwa dokumen e-Pas Kecil adalah bentuk pengakuan hukum sekaligus jaminan kelaiklautan fisik kapal mereka. Peningkatan pemahaman ini mendorong peningkatan kepatuhan nelayan secara mandiri untuk menyediakan dan memakai life jacket, melengkapi pompa bilga pencegah kebocoran, serta selalu memantau rilis informasi cuaca buruk dari BMKG sebelum memutuskan bertolak dari pelabuhan.

Bentuk dan Mekanisme Komunikasi Risiko Keselamatan Pelayaran

Integrasi strategis dilakukan dengan menjadikan momentum pendaftaran dan pengukuran fisik kapal oleh Ahli Ukur Kapal sebagai entry point (pintu masuk) utama komunikasi risiko, yang terdiri atas dua mekanisme berikut.

- Fungsi kontrol pra-validasi: sebelum lembar e-Pas Kecil diterbitkan, petugas melakukan pemeriksaan fisik secara objektif. Jika kapal nelayan kedapatan tidak memiliki life jacket atau APAR portabel sesuai ketentuan, proses validasi data teknis kelaikan akan ditangguhkan hingga pemilik melengkapinya.
- Sentuhan empati psikologis: di samping penegakan aturan fisik, petugas memberikan edukasi humanis saat pengukuran, mengomunikasikan kaitan antara angka stabilitas kapal dengan risiko ombak perairan Madura. Alih-alih mengancam dengan denda hukum, komunikasi difokuskan pada aspek kemanusiaan: mengingatkan nelayan akan tanggung jawab terhadap keselamatan diri demi anak-istri yang setia menunggu kepulangan mereka di rumah.

Bagian pembahasan ini menginterpretasikan temuan pada bagian Hasil dengan mengaitkannya pada kerangka teori yang relevan, membandingkannya dengan pola umum dalam literatur keselamatan dan komunikasi risiko, serta menjelaskan implikasinya bagi pengembangan kebijakan keselamatan pelayaran berbasis komunitas.

Dari Kepatuhan Administratif menuju Budaya Keselamatan

Temuan bahwa kesadaran nelayan Telaga Biru masih berkuat pada level compliance-driven dapat dijelaskan melalui model tangga budaya keselamatan (safety culture ladder) yang dikembangkan Hudson (2001), yang

membagi kematangan budaya keselamatan suatu organisasi atau komunitas ke dalam lima tingkatan: patologis, reaktif, kalkulatif, proaktif, dan generatif. Perilaku nelayan yang mengurus Pas Kecil semata demi menghindari sanksi Syahbandar, serta menyimpan life jacket hanya sebagai formalitas pemeriksaan, mengindikasikan posisi pada level reaktif menuju kalkulatif — keselamatan masih dipandang sebagai kewajiban regulasi eksternal, bukan nilai internal yang diyakini bersama oleh komunitas. Kondisi ini berbeda dari level proaktif atau generatif, di mana keselamatan telah menjadi bagian dari identitas dan praktik keseharian tanpa memerlukan pengawasan eksternal.

Pola ini juga selaras dengan konsep kesenjangan pengetahuan-sikap-perilaku (knowledge-attitude-practice gap) yang lazim ditemukan dalam kajian perilaku kesehatan dan keselamatan masyarakat: peningkatan pengetahuan formal tidak serta-merta mengubah sikap, dan perubahan sikap pun tidak otomatis termanifestasi dalam perilaku nyata. Pada kasus nelayan Telaga Biru, kesenjangan kognitif mengenai fungsi substantif Pas Kecil diperparah oleh bias optimisme berlebihan (overconfidence bias) — keyakinan bahwa pengalaman melaut turun-temurun secara otomatis menjamin keselamatan. Bias psikologis semacam ini merupakan temuan yang umum dijumpai dalam literatur perilaku risiko pada masyarakat nelayan tradisional, yang cenderung lebih mengandalkan pengetahuan lokal dan pengalaman empiris dibanding instrumen keselamatan formal.

Implikasinya, strategi peningkatan kesadaran keselamatan tidak dapat hanya mengandalkan penguatan aspek pengetahuan melalui penyuluhan satu arah, tetapi harus menyasar transformasi sikap dan pembiasaan perilaku secara simultan — sebagaimana tercermin dalam strategi integrasi komunikasi risiko yang dibahas berikut ini.

Pergeseran Paradigma Komunikasi Risiko: dari Top-Down menuju Dialogis-Partisipatif

Strategi KUPP Kelas III Telaga Biru yang mengubah pola komunikasi searah menjadi dialog dua arah berbasis komunitas mencerminkan pergeseran paradigmatis yang sejalan dengan teori komunikasi risiko yang dikembangkan Covello, yang menekankan bahwa efektivitas komunikasi risiko sangat bergantung pada tingkat kepercayaan (trust) audiens terhadap sumber pesan, tidak semata pada akurasi teknis informasi yang disampaikan. Pendekatan top-down yang mengandalkan ancaman sanksi hukum cenderung

memicu resistensi karena dipersepsikan sebagai intervensi otoritas eksternal yang tidak memahami konteks sosial-budaya nelayan.

Optimalisasi local champions — tokoh masyarakat, pemuka adat, dan ketua kelompok nelayan — sebagai penyebar pesan keselamatan dapat dijelaskan melalui teori difusi inovasi (diffusion of innovation) Rogers (2003), yang menegaskan bahwa penerimaan suatu gagasan atau praktik baru dalam komunitas sangat dipengaruhi oleh peran opinion leaders sebagai jembatan kepercayaan sosial. Dalam konteks komunitas nelayan yang memiliki ikatan sosial kuat dan cenderung skeptis terhadap birokrasi formal, figur lokal ini mempercepat proses adopsi norma keselamatan karena pesan disampaikan melalui saluran kepercayaan yang telah mapan, bukan melalui otoritas administratif yang berjarak secara sosial.

Integrasi teknologi digital (aplikasi Info BMKG, Laut Nusantara, broadcast WhatsApp) dengan pendekatan berbasis kearifan lokal turut menunjukkan penerapan model komunikasi risiko multi-saluran (multi-channel risk communication) yang relevan bagi masyarakat pesisir dengan tingkat literasi digital yang beragam: kanal digital menjangkau nelayan yang telah adaptif terhadap teknologi, sementara papan pengumuman, spanduk, dan sosialisasi tatap muka di ruang informal menjangkau segmen nelayan yang masih bergantung pada komunikasi lisan dan visual. Kombinasi ini penting mengingat keberagaman karakteristik demografis nelayan tradisional, yang tidak dapat didekati dengan pendekatan yang seragam.

Dampak positif berupa transformasi pola pikir nelayan yang mulai memahami e-Pas Kecil sebagai jaminan kelaiklautan — bukan sekadar dokumen administratif — mengindikasikan bahwa strategi integrasi ini berpotensi mendorong pergeseran level budaya keselamatan dari reaktif/kalkulatif menuju proaktif, meskipun keberlanjutan transformasi tersebut masih perlu dievaluasi lebih lanjut melalui pemantauan jangka panjang.

Momentum Pengukuran Kapal sebagai Titik Ungkit Komunikasi Risiko

Penjadikan proses pengukuran fisik kapal oleh Ahli Ukur Kapal sebagai entry point komunikasi risiko merupakan bentuk inovasi kelembagaan (institutional innovation) yang mengonversi momentum administratif rutin menjadi ruang intervensi perilaku. Pendekatan ini efektif karena momen pengukuran kapal merupakan titik kontak langsung antara otoritas pelabuhan dan nelayan yang bersifat wajib dan personal, sehingga pesan keselamatan

dapat disampaikan tepat sasaran (*just-in-time communication*) saat nelayan berada dalam konteks yang relevan secara kognitif dengan topik keselamatan kapal.

Fungsi kontrol pra-validasi — penundaan penerbitan e-Pas Kecil apabila kapal belum dilengkapi life jacket atau APAR — dapat dipandang sebagai mekanisme penguatan perilaku yang mengubah kepemilikan alat keselamatan dari sekadar anjuran menjadi prasyarat legal-administratif. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip menjadikan pilihan aman sebagai pilihan baku (*default option*) dalam kerangka *nudge*, karena kelengkapan alat keselamatan menjadi syarat yang tidak terhindarkan dalam proses legalisasi kapal, bukan pilihan sukarela yang dapat diabaikan.

Sementara itu, sentuhan empati psikologis yang menautkan aspek teknis (stabilitas kapal) dengan aspek emosional (tanggung jawab terhadap keluarga) menunjukkan pemanfaatan strategi pesan berbasis afeksi (*affect-based messaging*), yang dalam literatur komunikasi risiko dinilai lebih efektif membangkitkan kepedulian dan perubahan perilaku dibanding pesan berbasis ancaman semata (*fear appeal*), khususnya pada audiens dengan resistensi tinggi terhadap otoritas formal.

Secara keseluruhan, temuan pada ketiga rumusan masalah menunjukkan bahwa integrasi Pas Kecil dengan komunikasi risiko keselamatan di Pelabuhan Telaga Biru merupakan model kontekstual yang menggabungkan tiga pendekatan sekaligus: regulatif (*command-and-control* melalui validasi dokumen), partisipatif (dialog dan pelibatan tokoh lokal), serta psikologis (pendekatan afektif dan kearifan lokal). Model tripartit ini menawarkan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan keselamatan pelayaran berbasis komunitas (*community-based maritime safety policy*) yang berpotensi direplikasi di pelabuhan-pelabuhan perikanan tradisional lain dengan karakteristik sosial-budaya serupa, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada konsistensi implementasi dan penguatan kelembagaan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan budaya keselamatan maritim pada kapal di bawah 7 GT tidak dapat dicapai hanya melalui penegakan hukum administratif yang kaku. Tingkat kesadaran nelayan tradisional di Pelabuhan Telaga Biru berhasil ditingkatkan secara signifikan

melalui integrasi antara instrumen kontrol e-Pas Kecil dengan model komunikasi risiko dua arah yang interaktif, partisipatif, serta sosiokultural. Kesenjangan kognitif yang menganggap Pas Kecil sebagai formalitas administratif telah bergeser menjadi pemahaman akan fungsi substantifnya sebagai jaminan kelaiklautan, didukung oleh peran tokoh masyarakat sebagai agen perubahan dan pemanfaatan teknologi digital serta pendekatan berbasis kearifan lokal. Transformasi momentum pengukuran kapal menjadi ruang dialog berbasis empati dan tanggung jawab keluarga terbukti efektif meruntuhkan resistensi kultural nelayan, mengubah persepsi e-Pas Kecil dari semula dianggap "beban birokrasi" menjadi sebuah "sertifikat perlindungan nyawa".

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi longitudinal guna mengukur keberlanjutan dampak integrasi komunikasi risiko terhadap budaya keselamatan nelayan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penelitian komparatif di pelabuhan perikanan tradisional lainnya juga diperlukan untuk menguji replikabilitas model integrasi ini pada konteks sosial-budaya yang berbeda. Selain itu, kajian kuantitatif dengan sampel yang lebih besar dapat memperkuat temuan mengenai efektivitas model komunikasi risiko partisipatif dalam meningkatkan kepatuhan keselamatan, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan e-Pas Kecil di wilayah dengan tingkat literasi dan akses teknologi yang beragam.

REFERENSI

- Agatha, A. F. (2024). Dampak Endorsement Pas Kecil Kapal Terhadap Peningkatan Keamanan Dan Keselamatan Kapal Nelayan di Wilayah Kerja KSOP Kelas III Tanjung Pakis. *Jurnal Inovasi Pelayaran*, 5(1), 12–25.
- Antão, P., & Soares, C. (2020). Analysis of human factors in maritime accidents. *Maritime Policy & Management*, 47(5), 662–678.
- Coraddu, A., Oneto, L., Navas de Maya, B., & Kurt, R. (2020). Determining the most influential human factors in maritime accidents: A data-driven approach. *Ocean Engineering*, 211, 107588. <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107588>
- Dallo, I., & Marti, M. (2021). Why should I use a multi-hazard app? Assessing the public's information needs and app feature preferences in a participatory process. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 57, 102197. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102197>

- Domeh, V., Obeng, F., Khan, F., Bose, N., & Sanli, E. (2021). Risk analysis of man overboard scenario in a small fishing vessel. *Ocean Engineering*, 229, 108979. <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.108979>
- Fauziningrum, A., & dkk. (2025). Sosialisasi Safety Equipment: Upaya Meminimalisir Risiko Kecelakaan Kerja Nelayan di Pesisir Bonang Demak. *Jurnal Pengabdian Maritim Indonesia*, 3(1), 45–56.
- Obeng, F., Domeh, V., Khan, F., Bose, N., & Sanli, E. (2022a). Analyzing operational risk for small fishing vessels considering crew effectiveness. *Ocean Engineering*, 249, 110512. <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.110512>
- Obeng, F., Domeh, V., Khan, F., Bose, N., & Sanli, E. (2022b). Capsizing accident scenario model for small fishing trawler. *Safety Science*, 145, 105500. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105500>
- Patiranti, A. (2020). Strategi Komunikasi Risiko Pemerintah dalam Menangani Bencana Alam. *Jurnal Komunikasi Publik*, 14(2), 110–123.
- Pesireron, E. D., Firdaus, M., & Dimyati, M. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dokumen E-Pas Kecil Berbasis Aplikasi Terhadap Tingkat Kepuasan Pemilik Kapal Di Kantor KSOP Kelas III Tanjung Wangi. *Jurnal Administrasi Maritim*, 15(1), 115–129.
- Rahman, A., & Munadi, R. (2019). Manajemen Komunikasi Risiko dan Media Digital Komunitas. *Jurnal Ilmu Komunikasi Terapan*, 7(3), 89–104.
- Rizwanda, R., & Sari, J. A. (2024). Pelayanan Pas Kecil Bagi Nelayan di Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sadai. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(1), 95–103.
- Samsul, H., & Rizky, A. B. (2021). Pengaruh Budaya Keselamatan terhadap Kepatuhan Nelayan dalam Menggunakan Peralatan Keselamatan. *Jurnal Perikanan Indonesia*, 28(1), 45–58.
- Sánchez-Beaskoetxea, J., Basterretxea-Iribar, I., Sotés, I., & Machado, M. D. L. M. M. (2021). Human error in marine accidents: Is the crew normally to blame? *Maritime Transport Research*, 2, 100016. <https://doi.org/10.1016/j.martra.2021.100016>
- Saputra, M. R. I., Helmi, J., Kurnia, A., & Putra, S. (2025). The Application of Shipping Governance in the Management of Small E-Pas Outlet in Pangkil Village, Bintan Regency. *International Journal of Maritime Governance*, 2(1), 111–120.
- Silviani, E. (2025). Digitalisasi Administrasi Kapal Kecil dalam Meningkatkan Pengawasan Keselamatan Pelayaran Nasional. *Jurnal Transportasi Laut*, 12(2), 78–91.
- Sunardi, Choiron, M. A., Sugiarto, Setyarini, P. H., & Nurwahyudy, A. (2024). Fishing vessel safety in Indonesia: A study of accident characteristics and prevention strategies. *International Journal of Safety and Security*

Engineering, 14(2), 499–511. <https://doi.org/10.18280/ijssse.140217>
Uğurlu, F., Yıldız, S., Boran, M., Uğurlu, Ö., & Wang, J. (2020). Analysis of
fishing vessel accidents with Bayesian network and Chi-square methods.
Ocean Engineering, 198, 106956.
<https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.106956>